

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Isma Nova Liana¹, Jumrotul Ismi², Rohatul Laeli³

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, ismanova229@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, rohatulaeli02@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, jumrotulismi24@gmail.com

Abstrak: Internalisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun identitas dan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan pemahaman mengenai strategi internalisasi nilai-nilai tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan studi literatur dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan agar tetap relevan sebagai pedoman moral dan etika. Peneliti menemukan bahwa penerapan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks globalisasi. Faktor-faktor pendukung seperti pendidikan karakter dan praktik sosial yang berbasis Pancasila dapat memperkuat internalisasi nilai. Di sisi lain, terdapat kendala dalam bentuk pemahaman yang kurang mendalam dan kurangnya konsistensi dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Kata Kunci: Pancasila, Internalisasi, identitas bangsa, Pendidikan, masyarakat

*Correspondence Address:	ismanova229@gmail.com
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	30 May 2025	30 May 2025	30 July 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, internalisasi nilai-nilai Pancasila sangatlah penting untuk membangun identitas dan karakter bangsa yang kuat. Proses internalisasi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga praktik kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, harus ditanamkan sejak dini agar setiap individu dapat memahami dan mengamalkannya dalam berbagai situasi. Tanpa internalisasi yang efektif, nilai-nilai ini akan kehilangan makna dan relevansinya dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam era globalisasi ini, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin beragam. Nilai-nilai Pancasila sering kali terancam oleh pengaruh budaya asing dan perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi setiap generasi untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui penguatan pendidikan karakter yang berbasis Pancasila, diharapkan masyarakat dapat menciptakan kondisi yang harmonis dan berkeadilan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Lebih jauh lagi, internalisasi nilai-nilai Pancasila juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya, memerlukan nilai-nilai yang mampu

menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang inklusif, menjadi jembatan untuk terjalinnya persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, metode yang dapat digunakan untuk menginternalisasinya, serta dampak positif yang dapat dihasilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, akan diuraikan pula tantangan dan solusi untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan modern saat ini. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran vital Pancasila dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas.

METODE | METHOD

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (library research) Menurut John W. Creswell (2014) analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merangkum temuan dari penelitian sebelumnya untuk memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Creswell menekankan pentingnya meneliti berbagai sumber untuk memahami konteks, tren, dan kekurangan dalam literatur yang ada, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan penelitian yang relevan dan inovatif. Creswell juga menyoroti bahwa dalam analisis studi literatur, peneliti harus memperhatikan kualitas dan kredibilitas sumber yang digunakan. Proses ini meliputi pemilihan artikel, buku, dan dokumen yang relevan, serta analisis kritis terhadap metodologi dan temuan yang ada. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga membangun argumen yang solid untuk mendukung penelitian mereka, serta mengidentifikasi ruang lingkup untuk penelitian lebih lanjut.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merujuk pada literatur yang relevan dan terpercaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi tertulis, seperti artikel ilmiah, jurnal akademik, buku teks PPKn, serta dokumen kebijakan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Artikel karya Isma Nova Liana, Jumrotul Ismi, Rohatul Laeli. Dijadikan sebagai salah satu rujukan utama karena membahas secara eksplisit tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan pendidikan, budaya, dan praktik sosial.

Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis (analisis isi). Selain itu, metode studi literatur juga berfungsi untuk membantu peneliti mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Studi literatur yang baik melibatkan proses berpikir kritis, analisis, dan sintesis informasi dari sumber-sumber yang sudah dikumpulkan. Peneliti harus mampu untuk menyusun sebuah penelitian yang koheren dan sistematis Studi literatur yang harus mempunyai struktur yang jelas, mulai dari pengenalan topik yang dibahas, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dan pembahasan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi isi teks dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, bentuk internalisasi yang diterapkan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

Dari hasil kajian tersebut, peneliti menyusun interpretasi secara sistematis mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif konseptual, yakni dengan membandingkan gagasan-gagasan dari berbagai sumber untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan terhadap proses internalisasi nilai. Langkah ini bertujuan untuk memperkaya perspektif dalam menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi internalisasi nilai Pancasila serta kontribusinya terhadap pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan berkeadaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih menghadapi tantangan yang signifikan. Terdapat variasi dalam pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, dimana beberapa kelompok menginterpretasikan nilai-nilai tersebut secara berbeda, menyebabkan ketidaksielarasan dalam penerapan. Peran pendidikan, baik formal maupun nonformal, sangat penting dalam proses ini. Namun, masih terdapat kekurangan dalam metode pengajaran yang mengedepankan penghayatan dan pengalaman praktis, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Praktik sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan sering kali tidak diterapkan secara konsisten dalam interaksi sosial, terlihat dari adanya konflik dan kurangnya rasa toleransi di beberapa komunitas. Dalam pembahasan, peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai Pancasila. Faktor pendukung utama adalah adanya komunitas yang solid, di mana solidaritas tinggi cenderung meningkatkan keberhasilan dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat juga dapat memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, inisiatif pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan kurikulum yang relevan dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya nilai-nilai tersebut.

Namun terdapat juga faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti stereotip negatif terhadap kelompok tertentu yang dapat menghalangi penerapan nilai persatuan dan toleransi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program pendidikan dan kegiatan sosial yang fokus pada nilai-nilai Pancasila juga menjadi kendala dalam efektivitas internalisasi. Dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan ini, penelitian tekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadaban serta mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip.

Alfred North Whitehead (1864 – 1947), seorang tokoh utama dalam filsafat proses, berpendapat bahwa semua realitas di alam mengalami perubahan atau proses, yang mencakup kemajuan, kreativitas, dan hal-hal baru. Realitas bersifat dinamis dan terus “menjadi”, meskipun aspek permanen dan identitas diri dalam perubahan tetap penting untuk diperhatikan. Sifat ini juga dapat diterapkan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas (pengada). Pertanyaannya adalah, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? Selain itu,

nilai-nilai Pancasila mana yang harus kita pertahankan tanpa mengalami perubahan? Moerdiono (1995/1996) mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai tataran dalam ideologi Pancasila. Tataran pertama adalah nilai dasar, yang memiliki sifat sangat abstrak dan tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Nilai dasar ini berfungsi sebagai prinsip yang bersifat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta memiliki kebenaran yang serupa dengan aksioma. Dalam hal substansi, nilai-nilai dasar berkaitan dengan eksistensi, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan fundamental, dan karakteristik khusus. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara, berkembang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang menyengsarakan rakyat, serta dari cita-cita yang diilhami oleh agama dan tradisi tentang masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan kebersamaan, dan kesatuan.

Kedua, ada nilai instrumental yang bersifat kontekstual. Nilai ini berfungsi sebagai penjabaran dari nilai dasar, memberikan panduan untuk pelaksanaan dalam situasi dan waktu tertentu. Nilai instrumental harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tetapi tetap harus berlandaskan pada nilai dasar yang mendasarinya. Deskripsi ini dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan dinamis, dalam bentuk yang baru, asalkan tetap mencerminkan semangat nilai dasar tersebut. Dalam konteks ini, nilai instrumental meliputi kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, dan proyek-proyek yang mengikuti nilai dasar. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan nilai-nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, terdapat nilai praksis, yang mencerminkan bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk penerapan Pancasila, baik yang tercatat maupun yang tidak, oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta oleh organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, badan ekonomi, pemimpin komunitas, dan individu warga negara. Dari sudut pandang substansi, nilai praksis menjadi arena di mana idealisme bertemu dengan realita. Dari tahap pelaksanaan nilai yang dianut, sejatinya keberadaan nilai dasar dan nilai instrumental ditentukan oleh nilai praktik. Artinya, bukan pada konsep-konsep abstrak atau pada kebijakan, strategi, rencana, program, atau proyek itu sendiri, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan yang menjadi tolok ukur terakhir dari nilai yang dipegang. Bagi sebuah ideologi, yang terpenting adalah bukti penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebuah ideologi saja bisa memiliki rumusan yang sangat ideal dan logis serta konsisten pada nilai dasar dan nilai instrumental. Namun jika rumusan tersebut tidak dapat diimplementasikan dalam praktik, maka ideologi itu akan kehilangan kredibilitasnya. Moerdiono (1995/1996: 15) juga menekankan bahwa tantangan terbesar bagi Nilai instrumental, nilai dasar, dan nilai praktik harus konsisten satu sama lain. Jika nilai ketiga ini dapat dipertahankan dengan baik, maka ideologi tersebut tidak akan menghadapi masalah. Namun, masalah akan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian dalam aspek ketiga nilai ini.

Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penting untuk melakukan transformasi terhadap Pancasila yang bersifat formal dan abstrak, yang sering kali tampak universal. Proses ini meliputi pengembangan rumusan Pancasila yang lebih kolektif, yang mencakup pemahaman bersama di tingkat masyarakat, serta penyesuaian yang lebih spesifik untuk individu (Suwarno, 1993: 108). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi sebuah konsep yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga harus diinternalisasikan dalam karakteristik baik kelompok maupun individu. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjwai segala perilaku dan tindakan yang

dilakukan dalam konteks praktis, baik dalam ranah kenegaraan, politik, maupun dalam interaksi pribadi. Dengan menerapkan Pancasila secara konsisten dalam praktiknya, setiap individu dan kelompok diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Hal ini penting agar nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar terintegrasi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di tingkat masyarakat maupun negara.

Pentingnya aktualisasi ini juga menuntut adanya pendidikan yang berkelanjutan mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga generasi muda dapat memahami dan menghayati makna serta esensi dari nilai-nilai tersebut. Melalui pendidikan yang efektif, Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang membentuk karakter bangsa. Selanjutnya dalam proses penerapan Pancasila, perlu adanya evaluasi dan refleksi secara berkala untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tujuan awal dari Pancasila sebagai dasar negara dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, melalui upaya bersama untuk menjaga konsistensi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, kita dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban, menciptakan landasan yang kuat. Ideologi Pancasila dapat dipahami melalui gambaran proses transformasi dari Pancasila yang bersifat formal, yang mencakup kategori tematis seperti konsep dan teori, menjadi kategori imperatif yang berupa norma-norma, serta kategori operatif yang berwujud praktik kehidupan sehari-hari. Proses transformasi ini seharusnya berlangsung tanpa hambatan, asalkan tidak terjadi penyimpangan atau penyimpangan yang dapat mengganggu keabsahan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan ini bisa berupa pengurangan, penambahan, atau penggantian unsur-unsur penting dalam Pancasila (Suwarno, 1993: 110-111).

Dalam konteks operasionalisasi Pancasila, penting untuk melakukannya secara kreatif dan dinamis. Hal ini disebabkan oleh sifat Pancasila sebagai ideologi yang futuristik, yang menggambarkan nilai-nilai yang dicita-citakan dan diharapkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan sekedar sekedar teori, tetapi merupakan tujuan yang harus diperjuangkan dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan sosial dan kenegaraan bukanlah hal yang sepele. Soedjati Djiwandono (1995: 2-3) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kesalahpahaman mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati konsep Negara Pancasila dari berbagai segi. Sering kali, terdapat kecenderungan untuk menganggap beberapa konsep dan pengertian sebagai sesuatu yang sakral dan tabu, seolah-olah sudah final dan tidak dapat dibahas lagi. Pandangan seperti ini dapat menghambat perkembangan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap Pancasila.

Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang dialog dan refleksi yang konstruktif mengenai Pancasila, agar nilai-nilainya dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan lebih tepat dalam konteks kekinian. Dengan cara ini, diharapkan Pancasila dapat terus relevan dan menjadi pedoman bagi warga negara. Sikap yang cenderung menganggap konsep dan pengertian sebagai sesuatu yang tetap membuat segala sesuatu menjadi statis, kaku, dan tidak berkembang. Hal ini berisiko menyebabkan kita tertinggal dari perkembangan zaman, meskipun ada beberapa prinsip dasar yang mungkin memang memiliki nilai yang abadi dan tidak berubah. Ketidakaktualan nilai-nilai dasar Pancasila pada tingkat praksis menunjukkan bahwa kita perlu melakukan perubahan secara terus-menerus, baik dalam aspek konteks

maupun operasional. Ada banyak hal yang perlu ditinjau kembali dan dievaluasi. Beberapa konsep mungkin perlu diubah untuk menyesuaikan dengan konteks zaman yang terus berubah, sementara konsep lain mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut agar lebih relevan dan aplikatif. Selain itu, ada juga konsep yang perlu dijelaskan atau diperjelas agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Di sisi lain, ada pula beberapa ide atau praktik yang mungkin sudah tidak relevan lagi dan perlu ditinggalkan.

Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pancasila tetap hidup dan mampu memberikan pedoman yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan evaluasi dan pembaruan ini, kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi teori yang terpencil, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga Pancasila dapat terus berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang relevan bagi generasi sekarang dan mendatang. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila memerlukan proses pembaharuan yang berkelanjutan. Esensi dari pembaharuan itu sendiri adalah melakukan perbaikan dari dalam serta melalui sistem yang sudah ada. Dengan kata lain, pembaharuan ini mengharuskan adanya dinamika internal dalam Pancasila itu sendiri. Mengacu pada pendekatan teori Aristoteles, kita dapat memahami bahwa di dalam diri Pancasila sebagai suatu realitas terdapat potensi, yang berfungsi sebagai dasar kemungkinan untuk melakukan perubahan (dinamis).

Potensi yang dimaksud di sini Merujuk pada kemampuan dari subjek nyata, dalam hal ini Pancasila, untuk mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi dari dalam subjek itu sendiri. Konsep ini sejalan dengan pandangan AN Whitehead, yang menekankan bahwa setiap satuan aktual—yang dalam konteks ini termasuk Pancasila—memiliki daya kemungkinan untuk bertransformasi. Namun, perlu dicatat bahwa kemungkinan yang bukan kemungkinan secara murni logistik atau tujuan, seperti halnya sebuah batu yang dapat dipindahkan atau sebuah pohon yang dapat dipotong. Menurut Whitehead, setiap satuan aktual sebagai sebuah realitas adalah sumber daya untuk proses kementerian yang lebih lanjut. Jika kita memahami konsep ini dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap ketentuan hukum dan peraturan-undangan di berbagai tingkatan sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila—yang merupakan transformasi dari kategori tematis menjadi kategori imperatif—harus selalu terbuka terhadap peninjauan ulang dan evaluasi.

Ini penting agar kita dapat menilai dan mengkaji keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa seluruh aspek hukum dan peraturan yang ada tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini akan membantu memperkuat relevansi Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berubah, serta menjamin bahwa ideologi ini tetap menjadi pedoman yang hidup dan dinamis. Untuk memahami bagaimana transformasi Pancasila dapat diterapkan sebagai norma dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks bernegara, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap pasal-pasal yang mengungkapkan sila ke-4 Pancasila. Sila ini berkaitan erat dengan unsur-unsur fundamental negara, seperti wilayah, status kewarganegaraan, dan pemerintahan yang berdaulat. Dengan menganalisis pasal-pasal ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila berinteraksi dalam struktur dan fungsi pemerintahan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, untuk memahami bagaimana Pancasila bertransformasi dalam konteks kehidupan berbangsa, kita perlu melakukan analisis serupa terhadap pasal-pasal

yang mencerminkan sila ke-3. Sila ini berkaitan dengan identitas bangsa Indonesia dan mencakup berbagai faktor integratif yang berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Melalui analisis ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada penguatan identitas nasional dan bagaimana masyarakat dapat bersatu meskipun memiliki beragam latar belakang budaya, etnis, dan agama.

Selanjutnya untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap pasal-pasal yang mencakup sila ke-1, ke-2, dan ke-5. Sila-sila ini berhubungan dengan aspek-aspek penting seperti kehidupan beragama, kemanusiaan, serta isu-isu sosial dan ekonomi. Dengan menganalisis bagaimana pasal-pasal ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bagaimana Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial, mendorong nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Melalui pendekatan analitis ini, kita tidak hanya dapat memahami transformasi Pancasila secara teoritis, tetapi juga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya di berbagai aspek kehidupan.

2. Tantangan dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Di era globalisasi banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada saat ini yaitu sebagai berikut.

1. Munculnya organisasi masyarakat yang tidak berlandaskan Pancasila

Menurut Santoso (Roberto Salu Situru, 2019), organisasi ini muncul dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah sehingga muncul ide untuk membuat ideologi yang berbeda dengan yang ada sebelumnya, adanya ketidakpuasan diberbagai bidang seperti bidang ekonomi dan politik yang menyebabkan mereka ingin membuat peraturan dan mengatur diri mereka sendiri, dan pemahaman terhadap ajaran tertentu yang cenderung terhadap paham yang berbeda seperti separatis yang akan menyebabkan rusaknya tatanan nilai dan moral yang ada serta bisa saja menyebabkan disintegrasi.

Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena organisasi muncul salah satu disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah harus mencari solusi bagi permasalahan ini agar hal ini tidak terjadi yang akan mengakibatkan disintegrasi. Kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat dapat mengetahui dengan mudah mengenai berbagai informasi. Namun, banyak sekali masyarakat yang tidak memilah dan memilih berita yang mana yang harus dipercaya. Berita yang tidak benar atau hoax dapat menimbulkan beberapa masalah salah satunya yaitu terjadi kesalahpahaman kepada pihak lain yang bisa saja menimbulkan perpecahan. Menurut hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia (mastel) pada tahun 2017 mencatat sebanyak 92,40 persen berita bohong (hoax) disebarkan melalui media sosial dan 91,8 persen berita hoax yang tersebar berkaitan dengan sosial politik. Untuk mengurangi jumlah berita hoax yang tersebar beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan peran lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, literasi informasi yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar bisa menyeleksi dan cerdas terhadap informasi-informasi yang mereka terima maupun yang mereka sebar, pengawasan orang tua karena pengguna media sosial juga banyak yang masih duduk dibangku SD, penegakan dan sosialisasi hukum yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan terhadap pelaku penyebaran berita hoax sebagai efek jera, pembatasan dalam menggunakan media sosial. Pembatasan penggunaan media sosial sangat penting agar anak tidak terlalu sering menggunakan media sosial yang

bisa saja mereka tidak menerima informasi yang valid yang dapat merusak mereka nantinya.

2. Banyaknya korupsi di Indonesia

Korupsi menjadi kasus yang paling sering diberitakan. Banyak sekali pejabat negara yang melakukan korupsi yang akan menyebabkan masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menyebabkan terhambatnya pembangunan karena dana yang seharusnya untuk pembangunan disalahgunakan. Dengan adanya hal ini kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat terlihat semakin jelas yang dimana pejabat semakin memperkaya diri dan masyarakat banyak yang tidak sejahtera sehingga UUD 1945 pasal ayat 2 tidak terpenuhi. Faktanya masih banyak masyarakat yang pengangguran karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti yang terjadi ditahun ini banyak terjadi PHK karena adanya efisiensi anggaran.

3. Terjadinya masalah sosial dan moral

Masalah sosial dan moral menjadi salah satu tantangan dalam penerapan nilai-nilai pancasila. Berbagai bentuk masalah sosial yaitu dekadensi moral, pelanggaran hak asasi manusia, dan terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran sosial terhadap pentingnya penanaman moral sejak dini agar mereka tahu mana yang harus dilakukan atau diperbuat dan mana yang harus ditinggalkan.

4. Sikap individualisme yang berlebihan

Masalah ini bertentangan dengan budaya Indonesia yang berkaitan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang dijunjung oleh pancasila. Di era globalisasi ini, banyak sekali orang yang memikirkan dirinya sendiri dan berbuat semena-mena tanpa mereka memikirkan dampak dari perbuatan mereka terhadap orang lain. Hal ini sering disebabkan oleh kemajuan sosial ekonomi karena kondisi ekonomi yang baik dapat menyebabkan mereka bisa berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

3. Dampak Tidak Diterapkannya Nilai-Nilai Pancasila

Ketidak penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, merusak tatanan sosial dan harmoni dalam masyarakat. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah terjadinya konflik antar kelompok. Ketika satu kelompok merasa budayanya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, sikap eksklusivisme ini dapat memicu ketegangan sosial yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya, ketika sila pertama Pancasila, yang mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, diabaikan, konflik dapat muncul ketika individu atau kelompok tidak menghormati ritual ibadah orang lain. Ketidakpedulian terhadap keyakinan dan praktik agama yang berbeda menciptakan suasana permusuhan dan merusak hubungan antarumat beragama. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah juga menjadi dampak signifikan dari ketidakpenerapan nilai-nilai ini. Tanpa penerapan nilai-nilai Pancasila, pejabat negara cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka, yang mengakibatkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat secara luas. Ketidakadilan ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan mendalam, tetapi juga berpotensi memicu protes dan ketidakstabilan sosial. Lebih jauh lagi, hilangnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda dan meningkatnya kesenjangan sosial juga menjadi masalah yang mendesak. Generasi saat ini, yang terpengaruh oleh budaya asing yang masuk tanpa kendali, dapat kehilangan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Hal ini menuntut perhatian serius dalam pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila serta pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kesenjangan sosial semakin

meningkat akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan dan angka pengangguran meningkat. Jika pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan tidak terlaksana, ketidakadilan dan kecemburuan sosial akan terus berkembang, menciptakan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pelanggaran hak-hak warga negara dapat menimbulkan ketidakpuasan yang lebih dalam, di mana masyarakat enggan melaksanakan kewajiban mereka seperti membayar pajak karena merasa hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu, sangat penting untuk kembali menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis untuk semua.

4. Solusi dalam Mengatasi Tantangan yang di Hadapi dalam Penerapan Nilai Nilai Pancasila dan Dampak yang di Timbulkan dari Tidak di Terapkannya Nilai-Nilai Pancasila

Beberapa solusi untuk mengatasi masalah yang muncul akibat tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pendidikan Pancasila sejak usia dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak-anak. Proses pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga melibatkan pengalaman langsung dan pembiasaan sikap. Pembelajaran yang bersifat aktif dan interaktif, seperti diskusi tentang isu-isu sosial yang dihadapi siswa, dapat membantu mereka memahami nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi dengan lebih baik. Keteladanan dari guru juga sangat berpengaruh; pendidik yang menunjukkan kejujuran dan menghargai perbedaan akan lebih efektif dalam membentuk karakter siswa. Selain itu, peran keluarga sebagai fondasi karakter bangsa sangatlah vital. Orang tua perlu memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui contoh sikap yang saling menghargai dan praktik gotong royong di lingkungan rumah. Dukungan dari pemerintah dalam memberikan pendidikan parenting yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan semakin memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak-anak mereka.

Selanjutnya, pemanfaatan media massa dan teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pembuat konten digital untuk menghasilkan materi yang menanamkan semangat kebangsaan, toleransi, dan keadilan sosial. Selain itu, keteladanan pemimpin dan tokoh publik sangat penting; perilaku mereka harus mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan keadilan. Proses pemilihan pemimpin sebaiknya mempertimbangkan kualitas moral dan penghayatan nilai Pancasila, bukan hanya popularitas semata. Terakhir, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika hukum ditegakkan secara transparan dan konsisten, masyarakat akan lebih memiliki kepercayaan pada sistem negara dan termotivasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

5. Peluang dari di Terapkannya Nilai-Nilai Pancasila

Beberapa peluang dari penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu menjamin keadilan untuk semua rakyat Indonesia tanpa memandang status atau jabatan, menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melahirkan generasi yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Pada era saat ini, penting untuk generasi generasi bangsa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan terjalin hubungan yang harmonis.

Adapun beberapa bentuk-bentuk peluang dari diterapkannya nilai-nilai pancasila. Beberapa bentuknya sebagai berikut.

1. Penyebaran nilai-nilai pancasila bisa disebarakan melalui media digital seperti website, youtube, dan lain-lain. Di era globalisasi, semua kalangan masyarakat harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan bijak apalagi melihat salah satu tantangan dalam penerapan nilai-nilai pancasila yaitu berita hoax yang tersebar secara cepat melalui berbagai cara entah itu menggunakan media digital ataupun tidak. Untuk itu pemerintah maupun mahasiswa selaku agent of change atau agen perubahan dapat menyebarkan informasi tentang pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Literasi digital berbasis pancasila membantu masyarakat untuk memiliki etika, bertanggung jawab, dan cerdas dalam bermedia sosial agar mereka tidak mudah percaya terhadap informasi-informasi yang belum pasti kebenarannya.
3. Partisipasi publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang memungkinkan mereka menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebijakan tersebut bisa saja merugikan masyarakat. Mereka bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk mengawasi kebijakan kebijakan tersebut.
4. Penguatan identitas dan toleransi. Seperti yang kita tahu bahwa budaya merupakan identitas suatu bangsa. Namun, pada kenyataannya salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai pancasila yaitu mudahnya masuk budaya asing dan berkembang di Indonesia yang menyebabkan budaya kita perlahan luntur atau hilang. Dengan adanya tantangan ini, pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila menjadi sangat penting untuk memperkuat rasa cinta kita terhadap budaya kita sendiri. Selain itu, penting untuk kita selalu menghargai budaya-budaya di daerah lain dan tidak menganggap budaya kita yang paling baik agar tidak menimbulkan perpecahan antara daerah satu dengan yang lain.

Penerapan nilai-nilai pancasila menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi akan tetapi pancasila juga menjadi pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, pancasila muncul karena adanya persoalan mengenai moral. Selain mengenai persoalan moral tetapi juga untuk menjadi dasar negara yang dapat mempersatukan Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Namun, pemahaman mengenai nilai-nilai pancasila dikalangan generasi saat ini sangatlah minim. Untuk itu melalui teknologi yang berkembang kita bisa menyebarkan nilai-nilai pancasila ke generasi saat ini agar mereka paham betapa pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai pancasila.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila tidak hanya merupakan ideologi bangsa Indonesia tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa dan pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat tiga nilai dalam Pancasila yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di era globalisasi, banyak sekali tantangan tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila seperti munculnya organisasi Masyarakat yang tidak berlandaskan Pancasila, berita hoax yang mudah tersebar, banyaknya korupsi di Indonesia, terjadinya masalah social dan moral, dan sikap individualism yang berlebihan. Adapun dampak yang timbul karena nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan yaitu terjadinya konflik antarkelompok, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, hilangnya rasa nasionalisme dikalangan generasi saat ini, kesenjangan sosial semakin meningkat, dan pelanggaran terhadap

hak-hak warga negara sering terjadi. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu pendidikan pancasila sejak dini dan berbasis keteladanan, penguatan peran keluarga sebagai fondasi karakter bangsa, pemanfaatan media massa dan teknologi digital sebagai sarana penyebaran nilai, keteladanan pemimpin dan tokoh publik dalam menunjukkan nilai pancasila, optimalisasi peran organisasi sosial dan keagamaan, dan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Adapun peluang yang timbul apabila diterapkannya nilai-nilai pancasila yaitu Penyebaran nilai-nilai pancasila bisa disebarakan melalui media digital seperti website, youtube, dan lain-lain, Literasi digital berbasis pancasila membantu masyarakat untuk memiliki etika, bertanggung jawab, dan cerdas dalam bermedia sosial, partisipasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa melalui media massa, dan penguatan identitas dan toleransi.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan artikel ini. Penghargaan dan apresiasi penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing serta segenap civitas akademika Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram atas bimbingan, motivasi, serta fasilitas yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung hingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga apa yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak.

REFERENSI | REFERENCE

- Akmal, Sj. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
- Aulia, C. M., Putri, N. K., Yupravita, S. T., Nurmuawanah, S., Sultan, U., & Serang, A. T. (2024). Rendahnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 225–234.
- Besar, A. (1994, November). Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Perannya dalam Era Globalisasi). Dalam Seminar Nasional Panitia “Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi (hlm. 16-17).
- Cakranegara, JJS (2020). Membangun kesadaran sejarah kritis dan integratif untuk Indonesia maju. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* , 10 (1), 1 18.
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2020). Pengembangan Buku Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan kewarganegaraan*, 4 (2), 43-51.
- Franklyn Wang, J., Ulfatun Najjicha Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, F., & Teknologi Informasi dan Sains Data, F. (n.d.). Peluang Pancasila dalam Maraknya Digitalisasi.
- Hati, B. P. P. (2024). Tantangan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Dunia Modern. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4 (1).
- Indana Zulfa, N. (2018). Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Kemampuan Dalam Mengamalkan Sila-Sila Pancasila Siswa Di Kelas VIII SMP Negeri 3 Singojuruh Semester Ganjil. In *JPPKn* (Vol. 3, Issue 1).
- Khalisah, S., dkk. (2025). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa: Tantangan dan Solusi di Era Modern. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1b).
- Nasution, H. (2019). Urgensi Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2).

- Nurhadianto (2015). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23 (2).
- Pranarka, AMW (1985). Sejarah pemikiran tentang Pancasila. (Tanpa Judul). Putri, S. A. (2021). Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 57-74 (19).
- Sastraprataja, M. (1996). Pancasila dan Globalisasi, dalam Seminar nasional Pendidikan Pancasila, dihadiri atas kerjasama Forum Komunikasi Dosen Pancasila (FKDP) Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Tidar Magelang.
- Situru, R. S. (n.d.). Pancasila dan Tantangan Masa Kini. In *Elementary Journal* (Vol. 2).
- Sutrisno, S. (1986). Pancasila Sebagai Metode. Kebebasan. Yogyakarta.
- Thaher, I. (2024). Menata Negara Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi Undang Undang Dasar 1945: Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan.